



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DYAH KUSUMASTUTI
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN, PARIWISATA,
DAN TRANSFORMASI DIGITAL
3. NHK : 282710

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.310.000.000

1. Tanah Seluas 94 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah Seluas 94 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/90 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah Seluas 295 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 90.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.106.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 584.363.824

F. HARTA LAINNYA Rp. 635.000.000

Sub Total Rp. 5.725.863.824

III. HUTANG Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

5.725.863.824

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.